RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

Jl. Gose Gautama No. 96 Rantauprapat



PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU

RANTAUPRAPAT, November 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat Menyusun ***"Rencana Kerja (Renja) 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu"***.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan Rencana program / kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 yang telah mengacu kepada RKPD Tahun 2025 dan Sesuai dengan Program Kegiatan yang ada di Permendagri No.90 Tahun 2019.

Kami menyadari, Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian, kami berharap, dengan Rencana Kerja (Renja) ini semua kebijakan, dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Rantauprapat, November 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ANDREA NUZUL MANIK, S.STP, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19871014 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan Renja 3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN DENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU 4
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 4
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 5
2.3. Issu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD 9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 10
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah 10
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025 12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 14
BAB V PENUTUP 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan (planning) adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan melibatkan fungsi-fungsi manajemen yang structural. Hasil kerja yang tepat dan terukur dengan target tertentu, akan sangat sulit dicapai bila suatu kegiatan tanpa didahului perencanaan yang baik. Dalam konteks pembangunan daerah pelaksanaan setiap program dan kegiatan untuk mencapai hasil akhir yang baik dan efektif, dibutuhkan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur stakeholder atau pemangku kepentingan sehingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada sesuai dengan yang diharapkan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Jangka Menengah dalam kurun waktu lima Tahunan serta penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).untuk kurun waktu dua tahunan. Perencanaan Pembangunan yang terukur dan Komprehensif mengandung rangkaian Perencanaan yang bersifat Politik, Teknokratik, partisifatif, atas bawah (Top Down) dan bawah atas (Bottom-up).

Rancangan awal RKPD merupakan acuan Penyusunan Renja SKPD yang memuat Program dan Kegiatan Pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan baru, indicator kinerja, kelompok sasaran dan hal terkait lainnya yang menjadi bahan RKPD, berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu menyusun Renja SKPD. Dalam mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan perencanaan dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, serta berbagai resiko yang timbul. Oleh karena itu, Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tetap berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja OPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 58 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 20004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 20004 tentang pemerintah daerah
4. Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 20004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
5. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 20005 tentang pengelolaan keungan daerah ;
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 20006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 20007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pendoman pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah labuhanbatu
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembagunan daerah ,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menegah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembagunan jangka menegah daerah ,dan rencana pemerintah daerah;
9. Peraturan menteri dalam negeri no.90 tahun 2019 tentang klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencana pembagunan dan keuagan daerah ;
10. Peranturan presiden nomor 33tahun 2020 tentang standar harga satuan regional
11. Peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor 3 tahun 2024 tanggal 30 mei 2022 tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah kabupaten labuhanbatu.
12. Peraturan bupati labuhanbatu nomor 27 tahun 2022 tanggal 30 juni 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten labuhanbatu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja tahunan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan yang responsif gender dapat menikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk jangka waktu satu tahun mendatang .Dalam rangka kelanjutan Pembangunan lima tahun,sehingga secara bertahap dapat mewujutkan cita-cita masyarakat labuhanbatu.

Tujuan penyusunan rencana kerja tahunan adalah;

1) Renja disusun untuk mencerminkan keterkaitan dan kondistesin antara perencanaan,penganggaran,pelaksanan,dan pengawasan Pembangunan daerah.

2) Renja digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai tahap awal untuk dijadikan dokumen penggunaan anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan OPD tahunan.

1.4 sistematika penulisan rencana kerja

Secara garis besar rencana kerja (renja) Badan Pendapatan Daerah kabupaten labuhanbatu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1. latar belakang
1.2. landasan
1.3. maksud dan tujuan
1.4. sistematika penulisan

BAB II : evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun 2023

2.1. Pelaksanaan renja OPD tahun 2023 dan capaian renstra OPD
2.2. Analisisa kinerja pelayanan OPD
2.3. issu penting penyelenggraan tugas dan fungsi OPD

BAB III : Tujuan sasaran ,program dan kegiatan

3.1. Telaahan dan sasaran renja OPD
3.2. Tujuan sasaran renja OPD
3.3. program

BAB IV :penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN LALU

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Konsistensi Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Penyusunan Dokumen SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kebutuhan Pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Milik Daerah yang Terinventarisasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Daerah	Ratio Realisasi PAD Sektor Pajak Daerah	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program/kegiatan Urusan Pemerintahan mencakup 2 Program, 8 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.186.949.131, meliputi Belanja Pegawai Rp. 9.206.480.726, Belanja Langsung 20.980.765.943, dan Belanja Modal Rp. 999.702.462. Realisasi Keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 29.463.494.441 atau 94,47%.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**29.122.073.851,00**	**27.400.284.845,00**	**94,08%**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.520.000,00	66.212.750,00	99,53%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.060.710.726,00	7.564.382.756,00	83,48%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	342.840.000,00	317.461.680,00	92,59%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.693.445.825,00	1.649.811.981,00	97,42%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.871.000,00	639.600.000,00	90,99%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.652.436.000,00	16.561.571.678,00	99,45%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.250.300,00	601.244.000,00	99,66%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**2.064.875.280,00**	**2.063.209.596,00**	**99,91%**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.064.875.280,00	2.063.209.596,00	99,91%
	Jumlah	**31.186.949.131,00**	**29.463.494.441,00**	**94,47%**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai pelaksanaan Renja tahun lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Renja tahun berjalan. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan pencapaian target dan realisasi pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	42 Dokumen	85
2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	85
3. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21 Laporan	85
4. Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	85
5. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	85

6. Terlaksananya Analisa Pengembangan Retribusi Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	85
7. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Stel	151 Stel	85
8. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	3 Orang	85
9. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang	31 Orang	85
10. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1 Paket	85
11. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1 Paket	85
12. Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1 Paket	85
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1 Paket	85
14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1 Paket	85
15. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1 Dokumen	85
16. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	85
17. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1 Laporan	85
18. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7 Unit	85
19. Terlaksananya Pengadaan Mebel	Unit	10 Unit	85
20. Tersusunnya Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	85
	Laporan	1 Laporan	85

21. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik			
22. Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12 Laporan	85
23. Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	20 Unit	85
24. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	22 Unit	85
25. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	60 Unit	85
26. Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Unit	1 Paket	85
27. Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	55 Unit	85

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA	KELUARAN	TARGET	%
1. Terlaksananya Analisa Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	85
2. Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	85
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan	1 Laporan	85
4. Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan	Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	85

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan			
5. Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	2 Dokumen	85
6. Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	2 Dokumen	85

2.3. Issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan analisis kritikal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, antara lain:

- Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Daerah;
- Perbaikan mekanisme pendataan potensi pendapatan daerah;
- Peningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
- Mengoptimalkan implementasi peraturan daerah dan melakukan revitalisasi peraturan daerah yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah;
- Peningkatkan daya dukung sarana dan prasarana;
- Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
- Peningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola pajak dan retribusi daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan daerah secara sistematis,terarah,terpadu,menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,dengan jenjang perencanaan jangka Panjang,perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),sejalan dengan hal tersebut didalam UU No.25 Tahun 2004 dimaksud dengan pasal 7 menjelaskan bahwa setiap OPD wajib membuat dan memiliki renja OPD yang disusun dengan berpedoman pada renstra OPD dan mengacu pada RKPD dengan memuat kebijakan,program,kegiatan dan sub kegiatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan bagian penting yang ingin dicapai melalui Program yang direncanakan. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Setiap Program memiliki kuantitas atau kualitas capaian yang diinginkan untuk mencapai sasaran dan tujuan, selain itu digunakan untuk mencapai alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan olch Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu menyusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025. Sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan	Reformasi Birokrasi Unit Kerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4.Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 5.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.Pemeliharaan Barang Milik Daerah

				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Daerah	Rasio Realisasi PAD Sektor Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Kerja merupakan Kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah Menyusun Program dan Kegiatan untuk tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor
   - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
   - Analisa Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
   - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
   - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
   - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Peeolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
   - Penetapan Wajib Pajak Daerah
   - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dan Masyarakat termasuk yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksanaan program, renja perangkat daerah yang ditinjaklajuti dengan Menyusun kebijakan public baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalnya sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan RKPD tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efesien,untuk itu diperlukan Upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja,satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan Masyarakat pada umumnya,untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah di programkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan,rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi Masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanannya dangan tetap menerapkan prinsip-prinsip yaitu transparasi,akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kerja OPD akan berhasil bila didukung oleh peran serta Masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi.Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program Pembangunan sehingga keterlibatan Masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujutnya Pembangunan merata.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program,maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses Pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan,agar diperoleh hasil yang maksimal,serta sebagai umpan balik bagi perencanaan Pembangunan tahapan berikutnya.

Adapun rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, output,outcome,pagu indikatif,sumber pendanaan serta perangkat daerah pelaksana bagaimana terlampir berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**27.603.935.711,00**							**29.416.414.854,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**27.603.935.711,00**							**29.416.414.854,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**27.603.935.711,00**							**29.416.414.854,00**	
1	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan***	**100 %**			**100 %**	**26.648.855.711,00**						**100 %**	**27.310.313.614,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	66.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	70.537.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	42.700.000,00	Kab Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		44.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.230.000,00	Kab Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		7.971.075,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	16.840.000,00	Kab Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		18.566.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.017.054.611,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	-	8.957.517.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	7.013.704.611,00	Kab Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		8.954.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.350.000,00	Kab Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		3.517.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	349.118.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	-	296.230.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	125.118.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		60.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16 Orang	224.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		235.330.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	982.697.100,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	-	1.253.287.129,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		31.668.939,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.170.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	78.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		82.366.935,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	109.027.100,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		144.403.455,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10848 Dokumen	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		52.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		98.248.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	708.700.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		744.099.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16.598.016.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	-	16.150.644.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	9.840.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		10.332.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	15.403.818.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		14.640.996.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				34 Laporan	1.184.358.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		1.499.316.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	535.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	-	582.097.260,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI TARGET		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		40.341.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	231.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		243.181.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	111.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		116.550.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	125.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PENANDAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TEMA RPJPD	SASARAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		32.825.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase PAD terhadap Pendapatan***	-			**100 persen**	**2.055.080.000,00**						-	**2.106.101.340,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Realisasi PAD Sektor Pajak Daerah*	-			100 %	2.055.080.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Masyarakat Labuhanbatu	-	2.106.101.340,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	300.156.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Masyarakat Labuhanbatu		451.664.010,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	376.024.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Masyarakat Labuhanbatu		342.325.515,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN PADA KEGIATAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10000 Laporan	550.100.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Masyarakat Labuhanbatu		515.350.990,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2000 Obyek Pajak	228.100.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Masyarakat Labuhanbatu		239.475.915,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				99000 Dokumen	269.700.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Masyarakat Labuhanbatu		283.235.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				100 Dokumen	331.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Masyarakat Labuhanbatu		274.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		JUMLAH						**27.603.935.711,00**							**29.416.414.854,00**	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka proses pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 tidak lepas dari kesempurnaan, oleh karena itu dibutuhkan masukan dan saran untuk kemajuan bersama.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 disusun atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Rantauprapat, November 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ANDREA NUZUL MANIK, S.STP, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19871014 200602 1 001